

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa terdiri atas seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Asal usul adat istiadat diakui dan dihormati dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Arti desa juga menyimpan kearifan local yang luar biasa. Meskipun desa merupakan salah satu pendiri system demokrasi yang otonom dan berdaulat, desa juga memiliki system dan mekanisme pengelolaan serta norma sosialnya sendiri (Iqsan,2016).

Pemerintah desa dengan otonomi desa menerima tugas untuk memberikan inovasi guna memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih mandiri dalam pengelolaan dan meningkatkan hasil baik finansial maupun nonfinansial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut memiliki kemampuan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efektif.

Selama ini penyusunan APBDes masih berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (anggaran tambahan), sehingga realisasi belanja yang dibuat dalam APBDes sering diabaikan. Seringkali anggaran pendapatan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan potensial, sehingga pada tahap laporan pelaksanaan anggaran, pendapatan actual diharap lebih tinggi dari anggaran pendapatan yang dibuat, sedangkan pengeluaran relatif mudah dilakukan. Berjalan dan terkena

inefisiensi atau pemborosan dan kebocoran, sehingga ada kemungkinan anggaran biaya menjadi lebih tinggi dibandingkan potensi realisasi biaya sebenarnya.

Setiap desa mempunyai sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan potensi desanya. Begitu pula dengan pengeluaran desa tentunya harus disesuaikan dengan pendapatan desa. Semakin tinggi pendapatan desa maka semakin banyak pula pengeluaran yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Belanja desa seharusnya menjadi prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa. Desa harus mampu menyusun anggaran dan pendapatan desa secara baik dan benar, agar tujuan pembangunan desa tercapai dan kerja pembangunan desa tidak sia-sia.

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari proses pemantauan yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Pengendalian melalui system evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme system reward dan punishment (Mardiasmo,2010). Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2010).

Evaluasi hasil perekonomian sangat penting dalam menilai tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola perekonomian desa. Pelaporan tidak hanya menunjukkan kemampuan penggunaan dana public secara efektif, efisien dan ekonomis. Efektif yaitu penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan produksi yang maksimal, efisien artinya penggunaan anggaran harus mencapai tujuan atau sasaran untuk kepentingan umum, kemudian ekonomis yaitu

pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam dan kualitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Anggaran digunakan sebagai pedoman pembangunan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena kebutuhan masyarakat tidak terbatas dan kebutuhan tersebut terus bertambah (Siregar,2015).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2020-2022**

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	1.156.514.500,00	1.156.514.500,00	100%
2021	1.128.989.620,00	1.126.603.321,39	99,74
2022	1.129.009.400,00	1.127.610.518,18	99,81

*Sumber: Kantor Desa Watu Manggar 2023*

**Tabel 1.2**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2020-2022**

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	1.231.274.862,00	1229.414.661,00	99,68
2021	1.119.467708,04	1.108.800.465,45	99,57
2022	1.129.380.343,98	1.125.802.508,36	98,97

*Sumber: Kantor Desa Watu Manggar 2023*

Pada tabel 1.1 dan 1.2 Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020-2021. Pada tahun 2020 terdapat pendapatan senilai Rp1.231.274.862 yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.156.514.500, Dana Desa sebesar Rp783.924.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp53.563.500, dan Alokasi Dana Desa Rp318.727.000. Untuk anggaran belanja tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.231.274.862 yang dibelanjakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp359.954.201, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp694.664.117, Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan Rp3.956.544, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp172.700.000.

Pada tahun 2021 terdapat pendapatan sebesar Rp1.128.989.620, pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.116.491.645, Dana Desa Rp767.355.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp60.868.645, Alokasi Dana Desa Rp290.268.000, dan terdapat Pendapatan Lain-lain sebesar Rp10.497.975. kemudian untuk belanja pada tahun 2021 sebesar Rp1.119.467.708,04 belanja tersebut dikeluarkan untuk; Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp363.733.708,04, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp493.854.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp3.980.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp23.900.000, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp234.000.000.

Pada tahun 2022 anggaran pendapatannya sebesar Rp1.129.009.400, pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.097.599.400, Dana Desa Rp731.104.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp72.946.400, Alokasi Dana Desa Rp293.549.000, dan Pendapatan Lian-lain Rp31.500.000. Kemudian untuk belanja yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.129.380.343,98. Belanja tersebut dikeluarkan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp378.721.343,98, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp291.005.600, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp9.615.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp155.288.400, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp295.200.000.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 terlihat bahwa pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya berbeda-beda yaitu, pada tahun 2020 pendapatan terrealisasi sesuai target yang di anggarakan, dan belanja terrealisasi sebesar 99,68%. Realisasi pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan disbanding pada tahun sebelumnya yaitu realisasinya sebesar 99,80% sedangkan belanja sebesar 99,57%. Selain itu, realisasi pendapatan pada tahun 2022 meningkat sebesar 99,81% dan belanja berkurang sebesar 98,97% dari rencana anggaran.

Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan tahun 2020 telah dianggarkan dengan baik, namun pada tahun 2021-2022 anggaran pendapatan mengalami peningkatan, sedangkan belanja daerah setiap tahunnya tidak menentu, dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan meningkat kembali pada tahun 2022. Terkait dengan tahun 2021, terlihat pelaksanaan daerah masih dibawah total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak mencapai tujuannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi dengan judul: “Kinerja Keuangan Berbasis Analisis Anggaran Pada Desa Watu Manggar Kec. Macang Pacar Kab. Manggarai Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja keuangan di Desa Watu Manggar Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran Tahun Anggaran 2020-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun maanfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Untuk Akademis, peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan masukan dan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Untuk Peneliti, Penelitian ini memberikan manfaat dalam hal meningkatkan pemahaman tentang kinerja keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan lebih baik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Watu Manggar dalam hal mengambil keputusan yang lebih dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian kinerja keuangan desa dapat membantu masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat.